

**HAK *IJBAR* WALI TERHADAP WANITA**

**DALAM PERKAWINAN**

**(Studi Komparasi Pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**ACH. FAOZAN HAKIM**

**NIM : 99363710**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DR. HAMIM ILYAS, M. Ag.
2. DRS. RIYANTA, M. HUM.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2004**

**DR. HAMIM ILYAS, MA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ach. Faozan Hakim  
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ach. Faozan Hakim  
Nim : 99363710  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hak *Ijbar* Wali terhadap Wanita dalam Perkawinan (Studi  
Komparasi Pandangan Imām asy-Syafi'ī dan Imām Ma'lik )

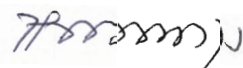
Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Jumad al-Akhir 1425 H.  
19 Juli 2004 M.

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, MA  
NIP : 150 235 955

**DRS. RIYANTA, M. HUM**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ach. Faozan Hakim  
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr .Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ach. Faozan Hakim  
Nim : 99363710  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hak *Ijbar* Wali terhadap Wanita dalam Perkawinan (Studi  
Komparasi Pandangan Imam asy-Syaḫīḫī dan Imām Maḫīk )

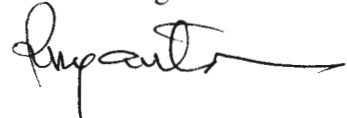
Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-I) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Jumad al-Akhir 1425 H.  
19 Juli 2004 M.

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum.  
NIP : 150 259 417

# PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**"HAK *LIBAR* WALI TERHADAP WANITA DALAM PERKAWINAN  
(Studi Komparasi Pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik )"**

disusun oleh

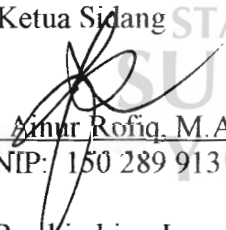
ACH. FAOZAN HAKIM  
NIM: 99363710

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2004 M./15 Jumad Akhir 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

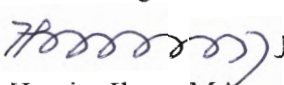
Yogyakarta, 20 Jumad Akhir 1425 H.  
7 Agustus 2004 M.

  
Dekan Fakultas Syariah  
Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A  
NIP: 150 182 698

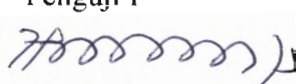
Ketua Sidang

  
Dr. Anur Rofiq, M. Ag.  
NIP: 150 289 913


Pembimbing I

  
Dr. Hamim Ilyas, MA  
NIP : 150 235 955

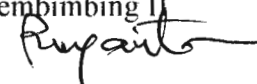
Penguji I

  
Dr. Hamim Ilyas, MA  
NIP : 150 235 955

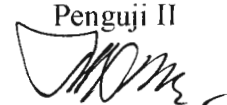
Sekretaris Sidang

  
Fatma Amilia, M. Si.  
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

  
Drs. Riyanta, M. Hum.  
NIP : 150 259 417

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP: 150 204 357

## MOTTO

وقل اعلموا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون .... (التوبة: ١٠٥)

” Katakanlah (Muhammad): bekerjalah (berusaha) kamu sekalian, niscaya Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat kerja keras (hasil dan upaya) kamu sekalian....”

*(at-Taubah: 105)*

” Tidak Memuliakan Seorang Wanita  
Kecuali Orang Yang Mulia ”

*(Ali ibn Abi Talib R.A)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*” Instropeksi dan Ikhlas terhadap masa lalu, Siap menghadapi masa sekarang, Optimis akan datang masa depan yang lebih cerah ”*

# PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Sebuah goresan karya intelektual bernuansa  
emosional dan kesabaran penyusun  
persembahkan kepada :**

Abah, Mama, Adik-adikku tercinta dan  
Almamaterku UIN Sunan Kalijaga  
Seseorang yang telah Memberi Motivasi  
dan Injeksi Moral dalam karya ini



## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu variabel yang diatur syari'at Islam berkenaan dengan interaksi manusia (*mu'āmalah*). Sebuah perkawinan sangat diperlukan kesiapan, kematangan jiwa dan tanggung jawab sebagai indikasi kedewasaan seseorang. Dalam era globalisasi dan emansipasi wanita, wanita Indonesia sudah terbiasa melakukan pekerjaan publik (*karier*), mengenyam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi yang mengindikasikan kemampuan wanita untuk memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun, banyak (masih ada) yang dijodohkan bahkan dipaksa (*ijbār*) orang tua atau wali, walaupun mereka menolak dengan alasan tidak cocok, masih sekolah dan kuliah ataupun mempunyai pilihan sendiri, tetapi penolakan mereka tidak berpengaruh signifikan dalam merubah keputusan orang tua, karena alasan balas budi wali terhadap besan ataupun teman, balas budi terhadap orang tua ataupun rasa takut wanita kepada mereka, sehingga timbul pertanyaan apakah hak menentukan pasangan dalam perkawinan sebagai hak wanita atau wali?, padahal persetujuan adalah salah satu syarat dalam akad perkawinan dan kunci menggapai keharmonisan keluarga.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pengikut *mazhab*, mereka banyak yang mempraktekkan *ijbār* dengan asumsi bahwa *ijbār* dibolehkan dan harus dipatuhi oleh anak mereka sehingga hak wanita sering dikesampingkan dan tidak dihormati. *Legal formal* mereka didasarkan pada *fiqh* tokoh *mazhab* (mujtahid) terkemuka terutama Imam asy-Syāfi'i dan Imam Mālik. Imam asy-Syāfi'i berpendapat, perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan walinya, akan tetapi seorang wali *mujbir* dapat memaksakan perkawinan kepada anak kecil, orang gila dan wanita virgin (*bikr*), sedangkan wanita yang tidak virgin (janda) tidak boleh dipaksa kawin karena kebebasan menentukan pasangan ada pada dirinya. Sifat kejandaan secara umum dapat menggugurkan *ijbār* terhadap wanita baik janda itu masih kecil maupun dewasa, walaupun korban pelecehan seksual dan zina. Hak *ijbār* dimiliki oleh bapak atau kakek. Imam Malik mengklasifikasikan status wanita dalam masalah *ijbār* menjadi gadis dan janda. Masing-masing status dibagi menjadi status masih kecil dan dewasa, gadis kecil dan sudah dewasa serta janda kecil boleh dipaksa kawin tanpa izin dan persetujuan mereka. Sifat kejandaan yang menggugurkan *ijbār* adalah hubungan seksual dalam perkawinan sah, subhat, ataupun kepemilikan syubhat, bukan sebab perzinaan ataupun pemerkosaan. Hak *ijbār* hanya dimiliki bapak atau orang yang mendapat wasiat dari bapak.

Latar belakang yang menyebabkan persamaan dan perbedaan produk pemikiran mereka tentang masalah *ijbār* adalah dasar pemikiran (ijtihad) mereka dalam menginterpretasikan *naṣṣ* otoritatif baik al-Qur'an maupun as-Sunnah dikolaborasikan dengan *aṣar* dan metode *istinbāṭ*, yang cenderung bersifat normatif deduktif, terutama interpretasi linguistik (*al-Qawā'id al-Lugawiyah*) terhadap *naṣṣ* otoritatif di atas, baik *mafhūm muwafaqah* maupun paham sebaliknya (*mafhūm mukhalafah*), penggunaan *al-Qiyās* dan perbedaan mendefinisikan status gadis dan janda.

Di samping itu, situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi mereka memberikan partisipasi dan kolaborasi dalam penetapan hukum. Imam asy-Syāfi'ī mengakui hadis *musnād* yang diriwayatkan beberapa orang saja (*hadis ahād*) tanpa harus disesuaikan dengan tradisi suatu masyarakat dan membantah *ijmā'* yang hanya dilakukan ulama' Madinah (satu daerah) serta menolak penggalian hukum dengan metode *istihsān* dan *istiṣhāb*. Sedangkan Imam Mālik mengakui tradisi penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) sebagai hujjah dan *ijmā'* yang hanya dilakukan ulama' Madinah serta menggugurkan hukum hadis *ahād* yang tidak sesuai dengan tradisi penduduk Madinah. Oleh karena itu, masalah *ijbār* dalam kehidupan masyarakat Indonesia perlu dipertimbangkan kembali ataupun dilakukan kontekstualisasi hukum Islam karena syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maṣlahah*) dari segala aspek kehidupan yang didasarkan tujuan ditetapkan hukum, yakni pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl wa al-gard*) dan harta kekayaan (*hifz al-māl*).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المالك الحق المبين مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع لجميع أمة الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji Syukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Hak *Ijbar* Wali terhadap Wanita dalam Perkawinan". Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-mustafā*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Sebuah proses pembaharuan dan supremasi etika dan moral (esensi) sangat berpengaruh dan diideakan dalam realita kehidupan di era tranformasi budaya dan intelektual saat ini, betapapun sempurna suatu norma dan aturan tidak akan cukup menangani berbagai masalah yang tak terhinga jumlah kuantitasnya karena norma dan aturan itu terbatas (statis) sementara manusia selalu berkembang dengan segala

komplektisitas yang dihadapi sehingga sebuah norma diharapkan dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial, alat kontrol sosial karena tujuan adanya hukum untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta kekayaan dan kehormatan.

Dengan segenap perjuangan yang panjang dan melelahkan, skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun membutuhkan waktu relatif lama dan berbagai proses yang dilalui sehingga penyusun tidak menafikan (*posible*) sering melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan untaian terima kasih kepada :

1. Segenap Birokrasi Institut terutama Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. Malik Madany, MA beserta Pembantu Dekan, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Drs. Abdul Halim, M. Hum dan Sekretaris Jurusan, Moh. Agus Najib, M.Ag. serta Penasehat Akademik, Drs. H. Toha Abdurrahman yang telah memberikan restu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA sebagai Pembimbing I dan Drs. Riyanta, M. Hum sebagai Pembimbing II yang telah memberikan kontribusi ide dan pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Abah, Mama dan Keluarga tercinta yang paling sabar dan tanpa pamrih memberikan bimbingan dan surprise moral dan material dari masa kecil penyusun sampai sekarang terutama dalam menempuh studi.
4. *The Best My Friend's and Some One* yang telah memberikan motivasi dan pesan damai dalam lubuk hati dan intuisi terutama Ade Citra Rarasati Sasandaru, Neng Euis Kurnasari, Om Oedin dan Om Ahkam.

5. Teman-teman di Jogja terutama Forum Santri Tegal Brebes (Foster), Keluarga Mahasiswa Tegal (Kamasita), Komunitas jurusan PMH-3 dan komunitas Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek L yang telah membentuk *skill* dan *power* serta karakter sosial-religia penyusun serta Siapapun yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini, eksklusif buat gus Much (M. Alamul Yaqin) yang tanpa pamrih menyediakan fasilitas Komputer, mas Hajir dengan kesabaran living costnya, adik-adik dan teman-teman yang tidak bisa diidentifikasi *One by One* dengan smile dan kebersamaan yang selalu tercipta dalam tonggak kenangan di kota yang penuh sensasi ini.

Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga coretan karya tipis ini dapat bermanfaat dalam dialektika sosial dan hukum Islam khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian. Amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Jumad al-Ula 1425 H.  
13 Juli 2004 M.  
Penyusun

Ach. Faozan Hakim

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang 'al'). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fiṭri</i>



### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

اَ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
اُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> furūḍ

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> qaul



**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof**

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>lain syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II   IMĀM ASY-SYĀFI' DAN PANDANGANNYA TENTANG HAK</b>	
<b><i>IJBĀR</i> WALI DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Sketsa Biografis Imām asy-Syāfi'ī .....	24

B. Pemikiran dan Metode <i>Istinbāḥ</i> serta Karya Imam asy-Syāfi'ī .....	31
C. Pandangan Imam asy-Syāfi'ī tentang Hak <i>Ijbār</i> Wali dalam Perkawinan .....	34
<b>BAB III IMĀM MĀLIK DAN PANDANGANNYA TENTANG HAK IJBĀR WALI DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Sketsa Biografis Imam Mālik .....	49
B. Pemikiran dan Metode <i>Istinbāḥ</i> serta Karya Imam Mālik .....	57
C. Pandangan Imam Mālik tentang Hak <i>Ijbār</i> Wali dalam Perkawinan	62
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMĀM MĀLIK</b>	
A. Dalil dan <i>Wajh al-Istidlāl</i> .....	72
B. Latar Belakang Perbedaan dan Persamaan Pandangan .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran-saran .....	113
<b>BIBLIOGRAFI</b> .....	115
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan Bahasa Asing (Arab) .....	I
2. Biografi Ulama .....	IV
3. Curriculum Vitae .....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam diturunkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia (*maṣlahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai risalah samawiyah terakhir yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, Syari'at Islam harus selalu berdiri di atas sendi-sendi istimewa sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan manusia, kapan dan di mana saja dengan solusi yang adil dan benar. Penetapan hukum dalam syari'at Islam selalu berorientasi pada aspek maslahat (termasuk menghilangkan kesulitan) yang didasarkan pada tujuan hukum itu ditetapkan yakni pemeliharaan agama (*hiḥfz al-dīn*), jiwa (*hiḥfz an-naḥfs*), akal (*hiḥfz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hiḥfz an-nasl wa al-ḥard*) dan harta kekayaan (*hiḥfz al-māl*).<sup>1</sup> Karena Syari'at Islam datang sebagai *rahmān li al-'ālamīn*.<sup>2</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber dari syari'at Islam (*source of law*), sekaligus undang-undang (*legal formal*) yang mengatur kehidupan manusia baik hubungan vertikal kepada sang Khaliq maupun hubungan horisontal antar sesama makhluk-

---

<sup>1</sup> 'Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 197-202. Lihat Abu Ishāq asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul asy-Syari'ah*, (Kairo: Mustafā Muhammad, t.t.), I: 324.

<sup>2</sup> Al-Anbiya' (21): 107.

Nya.<sup>3</sup> Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan wanita adalah seimbang (*equal*).<sup>4</sup> Keduanya diciptakan dari satu "nafs" (*living entity*), yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain.<sup>5</sup> Atas dasar itu, prinsip al-Qur'an terhadap hak kaum laki-laki dan kaum wanita adalah sama, hak istri diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing.<sup>6</sup> Itulah mengapa al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan (*humanitas*) yakni memberikan keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan kaum wanita, terlebih jika dikaitkan dengan masyarakat pra-Islam yang ditransformasikannya.

Status wanita dalam masyarakat pra-Islam sangatlah rendah, kaum wanita dianggap tidak lebih dari suatu komoditi. Rendahnya kaum wanita saat itu terlihat dalam hakikat perkawinan mereka yang *posesif*. Bahkan kebiasaan mengubur bayi wanita secara hidup-hidup adalah praktik kekerasan (*violence*) sebagai implikasi dari ideologi yang merendahkan kaum wanita pada masa pra-Islam. Ketidakadilan kaum laki-laki terhadap kaum wanita saat itu, jika digeneralisasikan disebabkan oleh dua

---

<sup>3</sup> Manna' al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (t.tp: Mahfudah, t.t.), hlm 19.

<sup>4</sup> An-Nisa' (4) :1

<sup>5</sup> Al-Hujurat (49): 13.

<sup>6</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 29.

faktor: *Pertama*, tuntutan kehidupan yang disebabkan oleh keadaan *nomaden* dan lingkungan yang sangat keras sehingga wanita tidak memungkinkan untuk berperan dalam proses kehidupan. *Kedua*, kaum wanita dipersiapkan oleh alam lingkungan untuk mencapai tujuan (obyek) tertentu. Sehingga kedatangan Islam justru untuk menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum wanita. Karena itu marginalisasi, *missogini* (membenci kaum wanita), deskriminasi dan subordinasi (merendahkan) serta melanggengkan kekerasan (*violence*) sangat bertentangan dengan paham keadilan dalam Islam.<sup>7</sup>

Namun ada beberapa ayat al-Qur'an secara tekstual mendukung superioritas kaum laki-laki atas kaum wanita baik dalam hal agama, politik maupun sosial dan budaya seperti dalam hal persaksian,<sup>8</sup> warisan<sup>9</sup> dan kepemimpinan.<sup>10</sup> Begitu juga as-Sunnah sebagai sumber hukum yang menjadi penjelas dari al-Qur'an, secara tekstual terdapat *hadis* yang mendeskreditkan kaum wanita misalnya salah satu *hadis* riwayat al-Bukhari, at-Tirmizi dan an-Nasa'i.<sup>11</sup> Jadi al-Qur'an dan as-Sunnah secara holistik mendeskripsikan wanita dalam dua tipe: *Pertama*, ayat atau hadis yang secara tegas

---

<sup>7</sup> Mansour Fakhri, "Posisi Kaum Wanita Dalam Islam : Tinjauan Dari Analisis Gender" dalam Mansour Fakhri dkk. (ed.), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 50-51.

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>9</sup> An-Nisa'(4): 11.

<sup>10</sup> An-Nisa' (4): 34.

<sup>11</sup> *Hadis* tentang masalah kepemimpinan wanita yaitu : *لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة*



dan umum menyatakan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. *Kedua*, ayat atau hadis yang secara tekstual mendukung superioritas laki-laki terhadap kaum wanita.<sup>12</sup>

Perkawinan merupakan salah satu variabel yang diatur syari'at Islam berkaitan dengan interaksi manusia (*mu'āmalah*) khususnya laki-laki dan wanita. Ia merupakan ikatan (*contract*) antara dua pihak sebagaimana akad *mu'āmalah* yang lain (jual beli), namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat (*mīṣāqan galīdā*) dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Karena maksud dan tujuan yang sangat mulia sehingga melaksanakannya adalah ibadah.<sup>13</sup> firman Allah SWT :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
ورحمة...<sup>14</sup>

<sup>12</sup> M. Atho Mudzhar, “Wanita Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern” dalam M. Atho Mudzhar dkk. (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia-Akses, Pemberdayaan Dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 141-143.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

<sup>14</sup> Ar-Rūm (30): 21.

Untuk mewujudkan visi dan misi perkawinan diperlukan kesiapan dan kemampuan atas segala hal baik lahir maupun batin, kematangan jiwa maupun tanggung jawab yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Suatu tugas mulia tidak mencapai target secara optimal apabila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas dalam membina rumah tangga. Karena perlunya rasa tanggung jawab ini maka perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi.<sup>15</sup> Sebagaimana tersirat dalam ḥadīs Nabi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء.<sup>16</sup>

Hukum perkawinan menurut konsensus *fuqāhā*<sup>17</sup> adalah sunnah.<sup>17</sup> Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali.<sup>18</sup> Karena setiap wali

<sup>15</sup> Chuzaimah T. Yanggo dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 73-74.

<sup>16</sup> Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II: 117, ḥadīs nomor 5066, “Kitāb an-Nikāh,” “Bab Man Lam Yastaṭi’ al-Bā’ah Falyaṣum.” Hadis diriwayatkan dari ‘Umār ibn Ḥafṣ’ dari bapaknya dari al-‘A’asy dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Abdullah ibn Mas’ūd. Lihat Abū Ḥusain ibn al-Hujjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), I: 638, ḥadīs nomor 1400, “16- Kitāb an-Nikāh,” “3- Bab Istihbab an-Nikāh li Man Taqat Nafsah ilaih wa Wujida Min’ah wa Isytiqal Man ‘Ajara ‘an al-Mi’an bi aṣ-Ṣaum.” Hadis diriwayatkan dari Yaḥyā ibn Yaḥyā, Abū Bakr ibn Syaibah dan Muḥammad ibn al-‘Alā’ dari Abī Usāmah dari Abū Mu’āwiyah dari al-‘A’asy dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Abdullāh ibn Mas’ūd.

<sup>17</sup> Ibn Rusydī al-Qurtūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (t. tp.: Dār Ithā al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), II: 4-5. Hukum perkawinan menurut az-Zāhiri adalah wajib. Menurut Mālikiyah Muta’akhirin adalah wajib, sunah dan mubah tergantung kekhawatiran individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut asy-Syāfi’iyah adalah sunnah.

<sup>18</sup> KHI pasal 14 dan 19. Lihat Sayyid Bakr ad-Dimyātī, *Fānah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), II: 316. Menurut Imām asy-Syāfi’i dan Imām Malik ibn Anas, eksistensi wali merupakan syarat sah perkawinan, tidak ada (gugur) perkawinan tanpa wali. Berbeda dengan Abu Hanīfah, wali

bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. *fuqāhā*<sup>19</sup> telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian: *Pertama*, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi wali *nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali *hākim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*.<sup>19</sup>

Dari klasifikasi di atas, wali *mujbir* menjadi kontroversi di antara para cendekiawan muslim. Pengertian wali *mujbir* dalam hal ini adalah orang yang mendapat keistimewaan (*ikhtisās*) penguasaan yang diberikan syara' kepada seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang di bawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut khususnya wanita dengan syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup> Tindakan yang dilakukan wali *mujbir* ini dinamakan *ijbār*.

Persetujuan merupakan salah satu persyaratan dalam akad perkawinan Islam. apabila salah satu pihak tidak setuju terhadap perkawinan seseorang, maka perkawinan dapat dibatalkan dengan adanya *khiyār* (pilihan meneruskan atau

---

adalah kesempurnaan akad bukan syarat sah. Akad perkawinan tetap sah walaupun tanpa keberadaan wali karena pihak yang bertransaksi adalah kedua mempelai. Lihat Ibn Rusydī al-Qurṭūbī, *Bidayah al-Mujtahid*, hal. 8.

<sup>19</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

membatalkan).<sup>21</sup> Persetujuan dan kerelaan seorang wanita secara umum dapat disimpulkan dari diamnya bagi wanita yang masih gadis (*virgin*) ataupun ucapan secara jelas bagi wanita yang berstatus janda (*sayyib*).<sup>22</sup> Hal ini berkaitan dengan hadis dari Ibn Abbās:

الأيّم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.<sup>23</sup>

Permasalahan *ijbār* menjadi pembicaraan serius para intelektual muslim kontemporer dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas masyarakat sekarang, banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik (*karier*), menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu menunjukkan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun masih ada (banyak) wanita yang dijodohkan, dipikirkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (*wali*). Tidak sedikit dari perkawinan tersebut yang dilakukan terhadap wanita pada usia belasan tahun, akan tetapi mereka tidak mampu menolak karena dipaksakan oleh para wali mereka dengan alasan hak *ijbār* dibolehkan syari'at Islam. Penolakan mereka secara nyata karena tidak cocok, masih

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (2). Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 27 ayat (1) dan (3).

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1). Lihat KHI pasal 16 ayat (2). Lihat juga Ibn Rusydī al-Qurṭūbī, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 3.

<sup>23</sup> Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, I: 649, ḥadīṣ' nomor 1421. Diriwayatkan Sa'īd ibn Mansur dan Qutajbah dari Imām Mālik ibn Anas dari 'Abd Allāh ibn al-Fadl dari Nafi' ibn Zubair dari Ibn Abbās. Lihat Jālaludīn Abd ar-Rahman as-Suyūṭī, *Tanwīr al-Hawālik li al-Muwatta' Malik*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), II: 62.

kecil, ingin meneruskan sekolah atau kuliah, mempunyai pilihan sendiri dan sebagainya tidak memberikan pengaruh signifikan. Sehingga timbul pertanyaan apakah hak menentukan pasangan merupakan hak wanita yang akan menikah atau walinya? Apa yang menyebabkan variabel *ijbār* terhadap wanita?. Kawin paksa tercatat sebagai penyebab perceraian cukup tinggi di Indonesia. Setiap tahun jumlahnya selalu meningkat, beberapa contoh kasus di Indonesia antara lain perceraian akibat kawin paksa di Indramayu termasuk paling tinggi di Jawa Barat, pada tahun 1999 mencapai 581 kasus, tahun 2000 menjadi 768 kasus dan tahun 2002 menjadi 781 kasus. Menurut Kepala Panitera PA Indramayu dan para hakim PA, kawin paksa ini banyak terjadi pada wanita usia belasan tahun, bahkan usia pasangan sering tidak seimbang. Dalam beberapa kasus wanita masih belia (usia di bawah 15 tahun) dikawinkan dengan lelaki berusia di atas 45 tahun.<sup>24</sup> Di Purworejo, pada tahun 2003 perceraian akibat suami tidak bertanggung jawab mencapai 205 kasus, akibat tidak harmonis 199 kasus dan akibat faktor ekonomi 138 kasus. Pada tahun 2004 perceraian akibat keharmonisan dan tidak tanggung jawab mencapai 299 kasus.<sup>25</sup> Bahkan masih banyak perceraian yang dilakukan di luar lembaga hukum Indonesia bagaikan piramida gunung es. Dari data PA tersebut menunjukkan bahwa kawin paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya masih menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia.

---

<sup>24</sup> "Pikiran Rakyat," (Bandung: 3 September 2003)

<sup>25</sup> "Radar Magelang" dalam Jawa Pos, (Surabaya: 27 Mei 2004)



Jumhur ulama dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut *mazhab*,<sup>26</sup> di antara mereka banyak yang mempraktekkan *ijbār* dengan mengikuti salah satu *mazhab*, mereka melakukan *ijbār* dengan asumsi bahwa *ijbār* ini harus dipatuhi oleh anak mereka sehingga hak wanita untuk memilih pasangan hidup sering dikesampingkan dan tidak dihormati. *Legal formal* mereka didasarkan pada *fiqh* tokoh *mazhab* terkemuka terutama Imām asy-Syāfi'ī, Imām Mālik dan tokoh yang lain yang sependapat dengan kedua mujtahid tersebut karena kedua tokoh mujtahid ini mensyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, namun mereka berbeda pandangan tentang hak *ijbār* ini.

Imām asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa seorang wali *mujbir* dapat memaksakan perkawinan kepada anak kecil, orang gila dan wanita virgin (*bikr*). Sedangkan wanita yang tidak virgin (janda) tidak boleh dipaksa kawin baik janda tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa karena kebebasan menentukan pilihan ada pada dirinya. Sifat kejandaan secara umum dapat menggugurkan *ijbār* wali terhadap wanita baik janda itu masih kecil maupun dewasa. Hak *ijbār* dimiliki oleh bapak atau kakek.<sup>27</sup>

Sedangkan Imām Mālik berpendapat bahwa wanita terbagi menjadi gadis dan janda. Masing-masing status tersebut dikelompokkan menjadi wanita masih kecil dan dewasa. Gadis berumur tua tidak boleh dipaksa kawin dan janda yang masih

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 107-109. Lihat juga Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 258-295.

<sup>27</sup> Asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), V: 18-20



kecil boleh dipaksa kawin. Sifat kejandaan bisa menggugurkan *ijbār* karena hubungan seksual dalam perkawinan yang sah, perkawinan subhat, ataupun kepemilikan (perbudakan) syubhat bukan karena sebab perzinaan ataupun pemerkosaan. Hak *ijbār* ini hanya dimiliki bapak saja atau orang yang mendapat wasiat dari bapak.<sup>28</sup>

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji pemikiran kedua mujtahid yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah *ijbār* terhadap wanita dalam perkawinan.

## B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas memunculkan banyak permasalahan yang hendak dikaji sehingga penyusun mensistematisasikan dengan membuat rumusan masalah tersebut untuk mempermudah dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita, terutama virgin (*al-Bikr*) dan janda (*as-Sayyib*) dan bagaimana dalil dan *wajh al-istidlāl* mereka?.
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh mujtahid tersebut?.

---

<sup>28</sup> Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra' li al-Imam Malik ibn Anas*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 100-103. Lihat Ibn Rusydi al-Qurṭubī, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 4 -5.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan lebih rinci pandangan Imām asy-Syāfi’ī dan Imām Mālik tentang konsep *ijbār* wali terhadap wanita terutama (*al-bikr*) dan janda (*as-sayyib*) dan menjelaskan dalil dan *wajh al istidlāl* mereka.
- b. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan pandangan Imām asy-Syāfi’ī dan Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan.

### 2. Kegunaan

- a. Kegunaan Ilmiah, Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*).
- b. Kegunaan Terapan, diharapkan dapat dijadikan pijakan dan kontribusi pemikiran dalam penelitian khususnya yang berorientasi *fiqh munākahat*.

## D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelitian dan eksplorasi pustaka, penyusun tidak menemukan literatur ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan menurut Imām asy-Syāfi’ī dan Imām Mālik. Walaupun pembahasan *ijbār* wali menurut salah satu Imam memang pernah dilakukan. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik.

Khotimatul Husna dalam skripsi "Relevansi Hak Ijbār Wali menurut Imām asy-Syāfi'ī dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan" menyimpulkan bahwa relevansi *ijbār* pandangan Imām asy-Syāfi'ī dalam realitas masyarakat Indonesia kurang memberi ruang gerak kepada wanita dalam menentukan pasangan. Ia juga mengulas kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam hak reproduksi.<sup>29</sup>

Dalam skripsi "Kebebasan Perempuan sebagai Mukallaf dalam Menentukan Pasangan Hidup Menurut Imām Hanafi dan Imām Mālik," Endang Purwanti mendeskripsikan perbedaan dan persamaan tentang pandangan Imām Mālik Ibn Anas dan Imām Hanafi, kemudian mensinkritiskan dengan posisi wanita sebagai mukallaf, namun tidak membahas perbandingan dengan Imām asy-Syāfi'ī khususnya masalah gadis dewasa dan janda masih kecil.<sup>30</sup>

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa perundang-undangan di negara-negara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) Harus ada wali atau izinnya. 2) Boleh tanpa ada wali. 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita. 4) Ada hak *ijbār* wali. Sedangkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Ia menyimpulkan

---

<sup>29</sup> Khotimatul Husna. "Relevansi Hak *ijbār* Wali Menurut Imām Asy-Syāfi'ī dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan," Skripsi Sarjana IAIN Yogyakarta, (2000).

<sup>30</sup> Endang Purwanti, "Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf Dalam Menentukan Pasangan Hidup Menurut Imām Hanafi dan Imām Mālik Ibn Anas," Skripsi Sarjana IAIN Yogyakarta, (2001).

bahwa konsep perundang-undangan kedua negara tersebut memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan kitab-kitab fikih tradisional.<sup>31</sup>

Husein Muhammad memaparkan, masalah *ijbār* seyogyanya tidak disamakan dengan *ikrah* yang mengasumsikan kesewenang-wenangan orang tua terhadap anaknya. Namun hendaknya diartikan sebagai *taklif* (sikap tanggung jawab) disertai i'tikad baik dari wali (orang tua) untuk mengarahkan dan membimbing masa depan anak (orang di bawah perwaliannya).<sup>32</sup>

Imām asy-Syāfi'ī dalam *al-Umm*, menjelaskan bahwa wanita yang masih gadis (*virgin*) baik kecil ataupun sudah dewasa boleh dipaksa kawin (*ijbār*) dengan pasangan hidup yang ditentukan oleh wali mujbir tanpa persetujuan gadis tersebut sedangkan wanita yang telah hilang *virginitasnya* (janda) tidak boleh dipaksa kawin baik ia masih kecil ataupun sudah dewasa karena kebebasan menentukan pilihan dan persetujuan ada pada dirinya sendiri. Sifat kejandaan secara universal inilah yang menyebabkan gugurnya *ijbār*. Hak *ijbār* dimiliki oleh Bapak dan Kakek.<sup>33</sup>

Dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā'* karya Sahnūn ibn Sa'īd at-Tanūkhī yang ditahbiskan oleh Abdurrahmān ibn Qāsim, Mālik ibn Anas berpandangan bahwa

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 201.

<sup>32</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama*, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 78-80.

<sup>33</sup> Imam asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), V: 18-20. Lihat Ibn Rusydi al-Qurṭubi, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 4-5.

kebebasan menentukan pilihan dan persetujuan hanya dimiliki oleh janda yang sudah dewasa selain itu hak pilihan ada pada wali mujbir. Hilangnya virginitas (status janda) tersebut karena perkawinan sah, perkawinan subhat ataupun kepemilikan bukan karena perzinaan, pemerkosaan atau sebab yang lain. Hak ijab dimiliki oleh bapak saja, selain bapak tidak diperbolehkan memaksa kawin wanita di bawah perwaliannya walaupun ia tidak tahu kebaikan terhadap dirinya (*sāfih*).<sup>34</sup>

Ibrāhīm ibn ‘Alī dalam karyanya *al-Muhazab* menyatakan wali *mujbir* boleh memaksa kawin dan menentukan pilihan kepada wanita di bawah perwaliannya, namun ia disunnahkan untuk meminta persetujuan sebagai informasi (kabar) bagi wanita yang bersangkutan. Persetujuan gadis adalah diamnya dan persetujuan janda dengan ucapan. Namun apabila virginitas hilang bukan karena seksualitas maka dihukumi dengan dua status: *Pertama*, wanita tersebut dihukumi seperti janda pada umumnya. *Kedua*, wanita tersebut disamakan dengan gadis pada umumnya.<sup>35</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pada dasarnya tujuan syari’at Islam adalah memelihara kemaslahatan (mendatangkan kemudahan dan menghindari kemafsadahan) baik di dunia maupun akhirat. Segala macam kasus hukum baik al-Qur’an dan as-Sunnah maupun ijtihad

<sup>34</sup> Saḥnūn ibn Sa’id at-Tanūkhi, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, hlm. 100-103.

<sup>35</sup> Abī Ishāq, *al-Muḥazab fī Fiqh al-Imam asy-Syāfi’i*, (Semarang: Thoḥa Putra, t.t.), II: 37.



bertitik tolak pada tujuan tersebut. Maslahat ini mengacu kepada lima hal yaitu : pemeliharaan agama (*hifz, ad-dīn*), jiwa (*hifz, an-nafs*), akal (*hifz, al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz, an-nasl wa al gard*) dan harta kekayaan (*hifz, al-māl*) yang menyangkut kebutuhan primer (*darūriyah*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyah*) dan kebutuhan tersier (*tahšīniyah*). Kemaslahatan yang dijelaskan secara eksplisit dalam *naṣṣ* disebut *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*. Jika maslahat yang dikandung sesuatu itu lebih kecil dari kerusakan dan mafsadahnya maka disebut *al-Maṣlahah al-Mulghah*. Untuk mengetahui maslahat dalam kedua sumber hukum di atas diperlukan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Dalam hal ini para mujtahid ada yang menggunakan metode *Qiyās, al-Maṣlahah al-Mursalah, Istihṣān, Istiṣlah* dan sebagainya. Semua itu bermuara pada *Maqāṣid asy-Syari'ah*.<sup>36</sup>

Disamping itu, untuk mengetahui tujuan teks (*naṣṣ*) al-Qur'an dan as-Sunnah diperlukan petunjuk (*dalālah*) baik petunjuk secara tekstual (*dalālah an-naṣṣ*) maupun petunjuk yang tersirat dibalik teks (*dalālah ma'qūlah an-naṣṣ*). Kedua metode tersebut dikenal dengan istilah *ṭuruq al-istinbāt*. Ada dua pendekatan untuk mengetahui metode tersebut: *Pertama*, pendekatan aspek bahasa yang disebut *al-Qawā'id al-Lugawīyyah*. *Kedua*, pendekatan dari makna dan tujuan yang terkandung

---

<sup>36</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 134.



dibalik teks yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-Ma'nawiyah* atau *al-Qawa'id asy-Syar'iyah*.<sup>37</sup>

Syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad di satu sisi sebagai respons terhadap problematika masyarakat Arab, namun di sisi lain harus bisa merespons terhadap kebutuhan dan problematika masyarakat Internasional. Sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah apabila diklasifikasikan terdiri dari dua macam: *Pertama*, teks (*nasy*) normatif-universal yang bebas konteks. Teks ini dipersiapkan untuk menjawab problematika yang terjadi di masa dulu, sekarang dan masa depan masyarakat dunia. Berisi prinsip-prinsip umum terutama masalah teologi dan kode etik. *Kedua*, teks (*nasy*) praktis-temporal yang mengandung ajaran khusus (kasuistik) terutama masalah hukum. Teks ini sebagai sarana menjawab problematika masyarakat Arab secara spesifik terutama pada masa-masa pewahyuan. Sehingga formulasi *fiqh* dan tafsir penuh dengan historisitas.<sup>38</sup>

Pendekatan *usul fiqh* tentang hak *ijbar* wali merupakan kolaborasi dua metode: *doktriner-normatif-deduktif* yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengutip ayat atau hadis tentang *ijbar* kemudian dijelaskan arti, maksud dan ilustrasi lain yang terkait dari pemikiran kedua tokoh mujtahid. Metode ini diimbangi dengan

---

<sup>37</sup> Agus Moh. Najib, "Dalalah An-Nash Upaya Memperluas Maksud Syari' Melalui Pendekatan Bahasa" dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta. AR-RUZZ, 2002), hlm. 96-97.

<sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, *Sebuah Kajian Fiqh: Sebuah Kajian Keperempuanan*, dalam Ainurrofiq, *Ibid.*, hlm. 248-251.

*empiris-historis-induktif* sebab meskipun kebenaran *nass* adalah mutlak, namun pemahaman terhadap *nass* tidaklah bersifat absolut, realitas yang terjadi di masyarakat haruslah diperhatikan untuk memahami dan mengaplikasikan petunjuk *nass* secara proporsional.<sup>39</sup> Karena hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual, sedangkan karakter *fiqh* adalah memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Sehingga perlu mengetahui syari'at yang berfungsi sebagai solusi terhadap persoalan kehidupan ataupun mengetahui *fiqh* sebagai penjabaran dari pergumulan kompleksitas situasi dan kondisi tertentu<sup>40</sup>

Pada dasarnya, *fiqh* merupakan bagian integral dari Syari'at Islam yang harus mengutamakan kemaslahatan secara holistik. Dalam realitas kontemporer, *fiqh* dijadikan satu pijakan (*legal formal*) untuk menghukumi, sehingga tradisi keagamaan yang dominan adalah tradisi *fiqh* yang sangat konvensional dengan produk hukumnya. Dalam kenyataan (*das sein*), *fiqh* seringkali meligitimasi tradisi masyarakat yang bias gender disebabkan tradisi *fiqh* sangat dominan menjadikan laki-laki sebagai "Subyek", artinya tradisi *fiqh* tidak bisa lepas dari latar belakang mujtahid, segi intelektualitas, sosial dan budaya tertentu karena seandainya lepas

---

<sup>39</sup> Fuad Arif Fudiyartanto, "Upaya Memahami Bahasa Agama Dengan Pendekatan Semiotika Sosial (Sebuah Pemerian Awal)," *Sosio-Religia: Jurnal Agama dan Ilmu Sosial*, Vol. 1: 3, (Mei 2002), hlm 71. Lihat Akh. Mikhaji, "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam" dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 191-193.

<sup>40</sup> Riyanta, "Legislasi Pada Masa Rasulullah" dalam Ainurrafiq, *Mazhab Jogja*, hlm 70-71

dari konteks sosial, mereka tidak relevan pada masa itu, bahkan produk pemikiran mereka dianggap imajinasi abstrak.<sup>41</sup>

Sebab perbedaan para tokoh mujtahid (*al-Aimmah al-Mujtahidīn*) adalah latar belakang sosial tempat tinggal mereka dan pemahaman mereka dalam memahami *nass* otoritatif (al-Qur'an dan as-Sunnah). Perbedaan mereka berpangkal pada perbedaan mereka mengenai tiga pokok permasalahan yaitu :

1. Perbedaan dalam menetapkan sebagian sumber-sumber hukum
2. Perbedaan mengenai hukum-hukum yang bertentangan
3. Perbedaan dalam prinsip kaidah bahasa yang mereka pakai dalam memahami *nass*.<sup>42</sup>

Salah satu syarat perkawinan dalam *fiqh* khususnya menurut Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik adalah adanya wali berbeda dengan Imām Hanafī. Sehingga adanya kerelaan kedua pihak antara wali dan mempelai (*ijāb qabūl*) juga menjadi syarat sah akad perkawinan dianalogikan dengan jual beli. Namun kedua mujtahid tersebut berbeda pendapat mengenai hak menentukan pilihan tersebut apakah menjadi hak wanita atau hak wali terutama batasan-batasannya. Perbedaan pendapat di antara *fuqāha*<sup>7</sup> tentang hak *ijbār* dalam menentukan pilihan terutama perbedaan

---

<sup>41</sup> Asghar Ali Engineer, "Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam" *Ulumul Qur'an*, Vol. V: 3, (Jakarta: LKAF, 1994), hlm. 68. Diterjemahkan oleh Kelompok Studi Perempuan Tjoet Njak Din.

<sup>42</sup> "Abd al-Wahhāb Khallāf, *Khulāṣah at-Tasyrī' al-Islāmī*, (ttp : tnp , 1997 ), hlm. 71.

pendefinisian kata secara etimologi dan terminologi dan penggunaan *al-Qiyās* dalam wilayah *Ijma'*.<sup>43</sup>

Realitas masyarakat sekarang khususnya Indonesia, terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi *mu'amalah*, ikut menanggung beban keluarga bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Namun banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut bahkan tidak jarang yang menjodohkan mereka ketika masih kecil (belum dewasa). Padahal jika melihat tujuan perkawinan yang sangat suci diperlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, percekocokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian.<sup>44</sup> Sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum (*maṣlahah mu'tabarah*) bukan kepentingan yang berpihak kepada golongan (khusus). Hal ini senada dengan *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah*:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ibn Rusydī al-Qurṭūbī, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 5.

<sup>44</sup> Chuzaimah T Yanggo dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 77-78.

<sup>45</sup> Asymuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qaidah Fiqh: Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan suatu masalah secara holistik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan dari karya-karya Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik dan karya lain yang dinisbatkan kepadanya, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan membandingkan kedua pendapat tersebut untuk dicari perbedaan dan persamaan.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan *uṣūl fiqh* yaitu mendekati masalah dengan *uṣūl fiqh* untuk mengkaji kembali pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik. Produk Pemikiran *fiqh* mereka tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan akan dideduksikan dengan kaidah *fiqh (al-Qawā'id al-Fiqhiyyah)* dan kaidah *uṣūl fiqh (al-Qawā'id al-Uṣūliyyah)* yang menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan khususnya hukum Islam.



bersifat khusus.<sup>46</sup> Metode ini di gunakan untuk menjelaskan ayat atau hadis Nabi dan definisi-definisi yang berkaitan dengan pembahasan tentang *ijbār* dari segi arti, maksud, tujuan dan sebagainya.

- b. Induktif,<sup>47</sup> yaitu menganalisis produk pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan dan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran mereka serta realitas masyarakat Islam Indonesia kemudian disimpulkan secara komprehensif.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan pendapat kedua mujtahid dari berbagai aspek, kemudian mencari perbedaan dan persamaan sehingga menjadi kesimpulan yang komprehensif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya.

Penyusun memulai dengan bab pertama yang berisi pendahuluan seputar latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan agar dapat dijadikan pijakan dan mempermudah dalam menyusun bab-bab selanjutnya.

---

<sup>46</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm.57-58.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

Penyusunan dilanjutkan dengan bab kedua yang berisi tentang biografi Imām asy-Syāfi'ī seputar pemikiran *fiqh*, guru dan murid Imām Mālik dan karya-karyanya, deskripsi pandangan dan metode *istinbāṭ* Imām asy-Syāfi'ī tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan. Bab ini dimaksudkan agar dapat memahami pandangan dan pemikiran Imām asy-Syāfi'ī secara lebih komprehensif.

Setelah itu, penyusunan dilanjutkan dengan bab ketiga berisi tentang biografi Imām Mālik, pemikiran dan karya-karyanya, konsep dan metode *istinbāṭ* Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan. Sebagaimana bab sebelumnya, bab ketiga ini juga membahas sejarah perkembangan pemikiran *fiqh*, guru dan murid Imām Mālik. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat berjalan secara obyektif dan tidak mendeskreditkan salah satu tokoh mujtahid.

Pada bab keempat, penyusun berusaha menganalisis terhadap obyek-obyek pembahasan mengenai pandangan, metode *istinbāṭ*, dalil dan *wajh al-istidlāl* serta jenis ijtihad yang dipakai kedua Imam kemudian mengkomparasikan pendapat kedua Imam tersebut dan memaparkan latar belakang perbedaan tersebut.

Penyusun akhiri dengan bab kelima sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk para pembaca khususnya dan para peneliti umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari deskripsi dan eksplorasi tentang masalah *ijbār* menurut pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik, sebuah perkawinan pada dasarnya harus didasari rasa tanggungjawab dan kasih sayang serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun baik laki-laki maupun wanita. Apabila perkawinan didasari unsur paksaan, maka dapat dilakukan *faskh* (pembatalan) karena akad perkawinan tersebut adalah *fāsid* (batal), akan tetapi sebuah akad perkawinan dianggap tidak sah tanpa keterlibatan keluarga pihak wanita (wali), bahkan seorang wali *mujbir* dapat mengawinkan wanita tanpa izin dan persetujuannya. Dalam masalah *ijbār*, mereka tidak menggunakan semua dalil dari hadis Nabi mengenai keharusan meminta persetujuan (*isti'mār*) wanita yang masih gadis dan janda dalam perkawinan. Mereka hanya menggunakan hadis tentang perintah meminta persetujuan (*isti'mār*) wanita yang sudah janda dan yatimah sehingga perbuatan wali untuk meminta persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan berbeda dengan janda. Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik membedakan wanita dalam masalah *ijbār* tergantung pada status wanita tersebut yang dipengaruhi oleh sebab (*'illah*). Gadis (*bikr*) menurut asy-Syāfi'ī yaitu wanita yang belum pernah berhubungan seksual dan masih tetap kegadisannya.

Disamping itu, wanita yang telah hilang kegadisannya karena efek haid, kecelakaan (jatuh), pembawaan sejak lahir dan wanita yang bercerai dengan suaminya karena cerai talak atau cerai mati sebelum berhubungan seksual termasuk kategori gadis, sedangkan janda (*sāyyib*) adalah wanita yang telah hilang virginitasnya sebab hubungan seksual dalam perkawinan yang sah, *fāsid* ataupun perzinahan dan korban pemerkosaan, walaupun berhubungan seksual dengan binatang. Seorang anak kecil adalah tidak cakap hukum, janda kecil tidak boleh dikawinkan sampai ia tumbuh dewasa karena keumuman status janda, seorang gadis tidak berpengalaman (*incapable*) dalam berhubungan intim dan seringkali malu karena kegadisannya dan hilangnya virginitas adalah hilangnya rasa malu tersebut. Pandangan Imām Mālik dalam masalah *ijbār* terhadap wanita tidak jauh berbeda dengan Imām asy-Syāfi'ī hanya saja beliau mengklasifikasikan korban perkosaan dan pelaku zina sebagai gadis (*bikr*) dan menyamakan gadis yang lama serumah dengan orang tuanya dengan janda. Seorang anak kecil tidak cakap hukum sehingga *ijbār* tetap berlaku terhadap janda kecil, rasa malu korban perkosaan dan pelaku zina lebih besar dibanding rasa malu seorang gadis. Di samping *istinbāṭ* yang digunakan mereka dengan *ijtihād bayānī* yang cenderung bersifat interpretasi linguistik (*al-Qawā'id al-Lugawiyah*) dan *ijtihād Qiyāsī* yang cenderung menggunakan penalaran *causa legis* (*'illah*) dengan cara metode analogis (*al-qiyās*).

2. Latar belakang yang menyebabkan perbedaan dan persamaan pandangan mereka adalah cara pandang mereka dalam memahami *naṣṣ* otoritatif baik al-Qur'an dan as-Sunnah dengan *ijtihād bayānī* yang cenderung bersifat linguistik dengan penekanan aspek kebahasaan (*al-Qawā'id al-Lugawiyah*) terutama penggunaan petunjuk kata terhadap makna (*dalālah*) yaitu *dalālah mantūq* dan *dalālah maḥmūm* baik *maḥmūm muwāfaqah* maupun *maḥmūm mukhālafah*, penggunaan makna dari sisi cakupan makna '*Am* dan *Khāṣ*, *majāzī* dan *haqqīqī*. Di samping itu, *ijtihād Qiyāsī* yang menggunakan penalaran *causa legis* ('illah) dengan cara metode analogis (*al-Qiyās*) terutama penggunaan *al-Qiyās* terhadap *Ijma'* yaitu bapak sebagai wali *mujbir* yang dapat mengawinkan anak kecil tanpa persetujuannya. Perbedaan penggunaan *dalīl al-khitāb* (*maḥmūm mukhālafah*) dan *lafẓ al-'Am*. dan perbedaan penggunaan *causa legis* ('illah *al-ḥukm*). Dalam pandangan Imām asy-Syāfi'ī, sebab dan 'illah dalam masalah *ijbār* adalah sifat masih kecil (*aṣ-ṣagr*) dan virginitas (*bikārah*) secara umum Menurut Imām Mālik, masing-masing sebab dari sifat masih kecil (*aṣ-ṣagr*), virginitas (*bikārah*) dan rasa malu (*hayā'*) berakibat hukum terhadap wanita yang masih kecil atau sudah dewasa, gadis atau janda serta gadis yatimah Disamping itu, perbedaan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Pandangan mereka bertemu dalam satu muara yaitu demi kebaikan (*maṣlahah*) wanita. Latar belakang kesamaan pandangan mereka terutama dalam mengistinbat hukum hadis secara *ijtihād bayānī* yaitu menggunakan *dalālah al-mantūq* dari hadis di atas.



## B. Saran-saran

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa secara detail konsep *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan dalam pandangan Imam asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik, penyusun memberikan saran kepada para pembaca dan para peneliti lainnya berkaitan masalah sosial dan gender pada khususnya, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan tidak parsial agar tidak ada nilai yang terdistorsi, baik dalam mengambil produk pemikiran cendekiawan muslim masa klasik, pra modern maupun kontemporer, karena setiap individu mereka dilatar belakangi berbagai karakter sosial budaya dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Oleh karena itu, pengalihan sebuah hukum tidak hanya bersifat normatif deduktif dengan titik kerangka awal teks hukum. Namun harus dikolaborasikan dengan penelitian empiris induktif, sehingga produk hukum tidak menjadi kaku dan statis sebab manusia dengan segala nalar dan intuisinya selalu berkembang dan berubah (*mutable*) sedangkan teks hukum selalu statis dan tidak berubah. Sangat wajar ketika para intelektual modern melakukan kontekstualisasi hukum. Dalam hal ini bukan semata-mata untuk mengikuti keinginan nafsu manusia dan sebuah tradisi, namun dengan asumsi hukum dapat ditemukan sisi orsinilitas, esensi serta obyektifitasnya dengan

tidak mendeskriminasikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk paling kompleks dan sempurna. Oleh karena itu, penyusun yakin dalam kajian ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu diadakan kajian yang lebih komprehensif. Akhirnya, penyusun menganjurkan kepada khalayak umum agar dalam masalah *ijbār* tidak didefinisikan sebagai kawin paksa yang harus dilakukan oleh siapapun, akan tetapi beralih menjadi sebuah tanggung jawab untuk mengawinkan seseorang sesuai pilihan dan kehendaknya, seorang wali hanya memberikan pertimbangan dan kontribusi pemikiran kepada calon mempelai. Sebab kondisi sosiologis ulama mazhab pada masa itu berbeda dengan fenomena masyarakat sekarang.

## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Qaṭṭān, Manna' al-, *Mabāhis fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ttp.: Mahfudāh, t.t.

### B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Ibn Hajar, *Fath al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Imām Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām al-Bukhārī, *Sāḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Imām Muslim, *Sāḥīḥ al-Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Mālik. Imām, *al-Muwatta'*, ttp.: Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951.

Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn as-, *Tanwīr al-Hawālik li al-Muwatta' Mālik*, Surabaya: al-Hidayah, t.t..

### C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih.

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syāfi'i*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abdurrahman, Asymuni, *Qa'idah-Qaidah Fiqh: Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.

- Bagdādī, 'Abd al-Wahāb al-, *al-Ma'ūnah 'alā Mazhab 'Alim al-Madīnah Mālik ibn Anas*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Baiḥaqī, Abī Bakr Ahmad ibn al-Husain al-, *Bayān Khaṭa' Man Akḥṭa'a 'Alā asy-Syāfi'ī*, Beirut : Muassah ar-Risālah, 1986.
- Bakry, as-Sayyid al-, *I'ānah at-Tālibīn*, Semarang: Toha putra, t.t.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fakih, Mansour, dkk. (ed.), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gazālī, Muḥammad ibn Muḥammad al-, *al-Wāsiṭ fi al-Mazāhib*, cet. ke-1, (ttp.: Dar as-Salām, 1997).
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Husna, Khotimatul, "Relevansi Hak Ijbar Wali Menurut Imām asy-Syāfi'ī dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2000.
- Ibrāhīm, Abī Ishāq, *al-Muḥaḥab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Semarang: Thoḥa Putra, t.t.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazhab al-'Arba'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Khallāf, 'Abd al-Wahāb, *'Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, ttp.: tnp., 1971.
- Khuly, Amīn, *Mālik ibn Anas*, Beirut: Dār al-Kutub al-Hadisah, t.t.
- Lihmr, Hamīd ibn Muḥammad, *Mālik ibn Anas Mufasssaran*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Purwanti, Endang, *Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf dalam Menentukan Pasangan Hidup Menurut Imam Mālik Ibn Anas dan Imam Ḥanafī*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001.
- Qurṭubī, Ibn Rusydī al-, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t..
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-35, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Siddeqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn as-, *al-Aṣybah wa an-Nadāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Syāfi'ī, Imām asy-, *ar-Risālah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t..
- \_\_\_\_\_, *al-Umm*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Syātibī, Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.t..
- Syarbīnī, Muḥammad asy-, *al-'Iqnā*, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Syarakhsi, Syams ad-Dīn asy-, *al-Mabṣūṭ*, Beirut: al-Ma'rifah, 1989.
- T. Yanggo, Chuzaimah dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.



Tanūkhī, Sahnūn ibn Sa'īd at-, *al-Mudawwanah al-Kubrā li al-Imām Mālik ibn Anas*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Zarqānī, Ibn Yuṣuf az-, *Syarh az-Zarqānī 'ala Muwaṭṭa' Mālik ibn Anas*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

#### **D. Kelompok Lain-lain.**

Dahlan, Adul Azis, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997/1998.

Ibn 'Ali, M. Maksum, *al-Amsilah at-Taṣrifīyah*, ttp.: Asy-Syeikh Salim ibn Sa'ad Nabhan, t.t.

Jawa Pos, 27 Mei 2004

*Majallah al-Buḥūs al-Islāmiyyah*, vol. 10, Riyād: 1404 H

Mudzhar, M. Atho (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia-Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Pikiran Rakyat, 3 September 2003

*Sosia Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, vol. I, no.3, Yogyakarta: 2002

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

*Ulumul Qur'an*, vol.V: 3, Jakarta: LKAF, 1994.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

## TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No	Bab	Hlm	Foot note	Terjemahan
1	I	3	11	Tidak akan mendapat kemenangan (keuntungan) suatu kaum apabila menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan.
2		4	14	Termasuk tanda kebesaran-Nya, Alah telah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia telah menciptakan kasih dan sayang yang mengikat ....
3		5	16	Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya untuk menikah karena dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaknya untuk berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng (dari keinginan nafsu).
4		7	23	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai izin dan persetujuannya. Persetujuannya adalah diamnya.
5		19	45	Menghindari bahaya ( <i>mafsadah</i> ) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.
6	II	37	26	...Tidak ada pemaksaan dalam beragama...
7		37	27	...maka barang siapa yang terpaksa memakan dengan tidak berniat melanggar dan tidak melampaui batas maka tidaklah berdosa....
8		40	32	Nabi SAW telah menikahiku pada waktu aku berusia 6 tahun atau 7 tahun dan serumah denganku sedang aku berusia 9 tahun.
9		40	33	-- sda – bab I hlm. 7 foot note 23.
10		44	43	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai izin dan persetujuan oleh bapaknya. Persetujuannya adalah diamnya.
11		44	44	Dari Khansa binti Khidam al-Ansariyah, bahwasanya bapaknya mengawinkannya sedangkan ia adalah janda dan ia menolak perkawinan tersebut kemudian mengunjungi Rasulullah SAW dan beliau menolak (tidak mengakui) perkawinan tersebut.

12		46	48	Bahwasanya Ibnu Umar mendatangi Nabi untuk ikut berpartisipasi dalam perang Uhud pada usia 14 tahun namun Nabi tidak membolehkan kemudian datang lagi pada perang Khandaq pada usia 15 tahun dan Nabi merestuinnya.	
13		47	49	Dan jika anak-anak kamu sekalian telah bermimpi (mencapai usia dewasa) maka hendaknya meminta izin (untuk masuk) sebagaimana orang-orang sebelummu yang meminta izin....	
14		48	51	Ujilah anak-anak yatim sampai sia kawin (dewasa), apabila telah mampu berdiri sendiri maka serahkanlah harta mereka....	
15	III	63	19	Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang yang saleh serta budak sahayamu baik laki-laki dan perempuan.	
16		63	20	Nabi SAW telah menikahiku pada waktu aku berusia 6 tahun dan serumah denganku sedang aku berusia 9 tahun.	
17		63	21	-- sda -- bab I hlm. 7, foot note 23.	
18		65	23	Seorang <i>yatimah</i> (wanita yang ditinggal mati bapaknya) diajak bermusyawarah dalam urusan dirinya (perkawinan), apabila diam itulah itulah izinnnya (persetujuan) dan apabila menolak maka tidak boleh mengawinkannya	
19		66	26	-- sda --bab I hlm. 7 foot note 23.	
20		66	28	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai perintah persetujuan untuk memberikan perintah. Persetujuannya adalah diamnya.	
21		67	29	-- sda -- bab III hlm. 65 foot note 23.	
22		67	31	-- sda -- bab II hlm. 48 foot note 52.	
23		71	38	-- sda -- bab II hlm. 48 foot note 51.	
24		IV	77	8	-- sda -- bab III hlm. 65 foot note 23.
25			77	9	Seorang janda tidak boleh dikawinkan sehingga ia diajak musyawarah, sedangkan gadis tidak boleh dikawinkan sehingga diminta izin dan persetujuannya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izin dan persetujuannya?, beliau menjawab: diamnya.
27	78		11	-- sda -- bab III, hlm. 63 foot note 20.	
28	79		12	Seorang anak kecil tidak mempunyai urusan terhadap dirinya sehingga ia berumur 15 tahun baik laki-laki	



			maupun wanita kecuali ia telah mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi wanita
29	80	16	-- sda -- bab II, hlm. 48 foot note 51.
30	81	21	Bahwasanya setiap wanita lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, persetujuan janda adalah ucapan dan persetujuan gadis adalah diam.
31	81	23	Hal itu sudah lumrah bagi perkawinan gadis.
32	83	26	-- sda -- bab III, hlm. 65 foot note 23.
33	83	27	Menerima sesuatu berarti menerima terhadap sesuatu yang dikandungnya (konsekuensi).
34	83	28	Pada dasarnya perjanjian (akad) adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui akad tersebut.
35	90	45	Diam tidak bisa dinisbatkan dengan sesuatu (menerima atau menolak)
36	91	46	-- sda -- bab III hlm. 66 foot note 23.
37	91	47	-- sda -- bab II hlm. 44 foot note 43.
38	91	48	Saya bertanya kepa Rasulullah SAW tentang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah ia harus dimintai persetujuannya atau tidak?, Rasulullah SAW menjawab kepadanya: ya, ia harus diminta persetujuannya. Kemudian Aisyah bertanya, saya bertanya kepadanya bahwa gadis tersebut malu maka Rasulullah SAW menjawab: jika demikian maka persetujuannya adalah diamnya.
39	91	49	Bahwasanya seorang gadis datang kepada nabi SAW kemudian bercerita bahwa bapaknya menikahkannya padahal ia menolak, kemudian Nabi memberikan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan ( <i>khiyār</i> ) kepadanya.
40	91		Menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan.
41	97	58	<i>Al-Qiyās</i> itu ada dua macam; Pertama, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang tercakup dalam ketentuan pokok. Kedua, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini, <i>al-Qiyās</i> harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam <i>al-Qiyās</i> ini perbedaan kesimpulan memang sering terjadi
42	105	75	Tidak bisa dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan masa.

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### 1. Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu'Abd Allāh Muḥammad ibn Abū Ḥasan Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Mugīrah al-Bardizah al-Jāfy al-Bukhārī. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di Kota Bukhārā. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah. Beliau penulis "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan paling tinggi.

### 2. Abu Dāwud

Lahir tahun 202 h/817 M. di kota Sijistan, terletak antara negara Iran dan Aghanistan. Beliau adalah seorang ahli hadis dan mujtahid. Di antara gurunya yaitu Sulaimān ibn Harb, 'Usmān ibn Syaibān dan Wālid aṭ-Ṭayālīs. Sedangkan murid beliau yang terkenal antara lain an-Nasāī, at-Turmudī, Abu 'Awwānah dan lain-lain. Beliau sebagai penulis "*Sunan Abū Dāwud*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis). Beliau wafat di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 Syawwal 275 h / 21 Februari 889 M.

### 3. Asghar Ali Engineer

Beliau adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi berkebangsaan India yang memiliki reputasi Internasional. Jabatan yang dipegang sekarang adalah ketua Asian muslim Action Network (AMAN), bombay, India. Karyanya banyak beredar dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa baik dalam bidang treologi Islam, sejarah maupun filsafat Islam antara lain: "*The right of Women The Orign and Development.*"

### 4. Abu Ḥanīfah

Nama aslinya adalah Nu'mān ibn Ṣabit al-Taimī, lahir tahun 80 H./ 699 M. di Kufah dan wafat pada tahun 150 H/767 M di Baghdad. Beliau Hanifah hidup di dua Dinasti (ulama dua masa) sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abbasiyah. Situasi perkembangan pemikiran di zaman Abu hanifah sama dengan suasana perkembangan pemikiran di zaman Imam Malik. Pada zaman ini merupakan zaman kemajuan. Kegiatan keilmuan pada periode ini tidak hanya berkisar dalam bidang fiqh saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu sosial lainnya. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya'kub ibnu Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibnu al-Hasal al-Syaibani (132-189 H/749-804 M).



**5. 'Abd al-Wahhāb Khallāf**

Beliau lahir di *kafir az-Zayyāt* pada bulan Maret 1988 M. Beliau menjadi dosen di Universitas Kairo, Mesir sejak tahun 1934 M dan ditetapkan sebagai guru besar Universitas al-Azhar pada tahun 1948 M. dan wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1948 M. karya beliau antara lain: *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syahsiyyah*, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, *as-Siyāsah asy-Syari'ah*, *al-waqf wa al-Mawāris* dan lain sebagainya.

**6. Imām Muslim**

Nama lengkapnya adalah Imām al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusairī an-Naisāburī. Ia lahir di Kota Naisābur pada tahun 204 H/820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi SAW sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Kahrasan ini ia belajar kepada Yahyā bin Yahyā dan Ishāq bin Rahāwiyah, di Hijaz ia belajar kepada Sa'id ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir ia belajar kepada Amr ibn Sawād dan Harmalah bin Yahyv. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Usmān bin Abi Syaibah dan Imam Bukhārī. Beliau sebagai penulis "*Ṣaḥīḥ al-Muslim*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan kedua.

**7. Jaih Mubarak**

beliau lahir di desa Bojong Kulur, Gunung Patri kabupaten Bogor. Beliau mengakhiri studinya, S-3 PPs IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1998. beliau sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 1993, dosen luar biasa program Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Djati sejak tahun 1998, ketua PKPHI IAID Ciamis sejak tahun 1998 dan lain sebagainya. Karya beliau antara lain: *Metodologi Studi Islam (2001)*, *Kaidah Fikih Islam : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*.

**8. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy**

Beliau lahir di Lhoukseumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1994 dan wafat di jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. beliau pernah menjadi Guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DR. HC Universitas Bandung pada bulan maret 1975, DR. HC IAIN Sunan Kalijaga pada bulan Oktober 1975.

**9. Asy-Syātībī**

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishāq albrāhim ibn Musā ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syātibi. Beliau wafat hari Selasa tanggal 8 sya'bān 790 H./ 388 M. Beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan Sultan Nasri. Karya beliau yang terkenal antara lain : *al-furuq* yang berisi *Qaidah fiqh* dan *usul fiqh* dalam mazhab Māliki, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah* dalam ilmu *usul fiqh* dan *al-I'tisām* sebagai Indeks dari kitab *al-Muwāfaqāt*. Beliau termasuk pengikut mazhab Māliki.

#### 10. Ibn Rusyd al-Qurtubī

Nama lengkapnya adalah Abu al-Wālid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. Lahir di Cordoba, negara Andalusia, sekarang negara Spanyol. Ia seorang Dokter, ahli hukum dan tokoh filsuf yang paling menonjol pada masa filsafat Islam (700-1200 M.), di negara Barat (benua Eropa dan Amerika) beliau terkenal dengan Averoes. Ia pernah menduduki jabatan hākim di Sevilla dan Cordoba. Karya-karya beliau antar lain : *Kitā d al-Kulliyah* (pengetahuan tentang filsafat), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (pengetahuan tentang hukum Islam dalam perbandingan), *al-Kasyf al-Manāhij al-'Adillah fī 'Aqā'id al-Millah* (buku filsafat dan teologi) serta karya paling kontroversial yang membela para filsuf dari tuduhan kafir yaitu kitab *Tahāfut at-Tahāfut*. Beliau termasuk penganut mazhab Maliki.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Ach. Faozan Hakim  
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 09 Mei 1980  
Nim : 99363710  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. P. Antasari Rt. 01/03 desa Keturen kec. Tegal Selatan  
kota Tegal Jawa Tengah 52134

### Orang Tua :

Nama Ayah : H. M. Abdul Khalim.  
Nama Ibu : Hj. Roikhatul Jannah  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Jl. P. Antasari Rt. 01/03 desa Keturen kec. Tegal Selatan  
kota Tegal Jawa Tengah 52134

### Riwayat Pendidikan :

1. M.I. Nurul Huda Keturen masuk tahun 1987 lulus tahun 1993.
2. MTs Al-Hikmah Benda-Sirampog-Brebes masuk tahun 1993 lulus tahun 1996.
3. MAK Al-Hikmah Benda-Sirampog-Brebes masuk tahun 1996 lulus tahun 1999.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah tahun akademik 1999/2000.

### Pengalaman Organisasi :

Ketua Keluarga Mahasiswa Tegal (Kamasita) Yogyakarta (2001-2002)  
Ketua Forum Santri Tegal Brebes (Foster) Yogyakarta (2002-2003)  
Pengurus Madrasah Diniyyah PP. Al-Munawir Komplek "L" (2003-2004)